

ANALISIS STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN JAYAPURA***ANALYSIS OF THE SOCIAL SERVICE DEPARTMENT'S STRATEGY IN IMPLEMENTING THE STUNTING INTERVENTION ASSISTANCE PROGRAMME IN JAYAPURA REGENCY*****Siti Fatimah¹**

Universitas Yapis

Papua¹

email:

fatimah.halim67@gmail.com**Yulianto²**

Universitas Yapis

Papua²

email:

javejulian2@gmail.com**Sumantri³**

Universitas Yapis

Papua³

email:

sumantriacc@gmail.com**Abdul Rahman Basri⁴**

Universitas Yapis

Papua⁴

email:

abdurahmanbasri67@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 3, pp. 295-305

Juli 2026

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Permasalahan stunting melibatkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat, namun, dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gizi, serta minimnya dokumentasi ilmiah mengenai strategi yang diterapkan Dinas Sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Sosial dalam Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen seperti perancangan, kesesuaian sumber daya, pelaksanaan, koordinasi antar sektor, serta monitoring dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari informan yang ditentukan, termasuk Kepala Dinas dan petugas terkait, dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial merencanakan program berdasarkan data kesehatan yang valid, meskipun ada keterbatasan sumber daya. Kolaborasi antar sektor telah membantu mengatasi tantangan, dengan fokus pada distribusi paket pangan bergizi dan dukungan dari Bappeda serta Dinas Kesehatan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan memberikan umpan balik meski masih terbatas. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan kontribusi positif dalam penanganan stunting di Kabupaten Jayapura, walaupun penguatan dalam monitoring dan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi; Pencegahan Stunting; Bantuan Sosial.

Abstract: The issue of stunting encompasses health, social, economic, and behavioural aspects of the community; however, its implementation faces challenges such as budgetary constraints, insufficient inter-agency synergy, and low public awareness regarding nutrition, as well as a lack of scientific documentation concerning the strategies employed by the Social Service Department. Therefore, this research aims to identify and analyse the strategy of the Social Service Department in the Stunting Handling Assistance Distribution Programme in Jayapura Regency. Employing a descriptive qualitative approach, this study explores elements such as programme design, resource adequacy, implementation, cross-sector coordination, as well as monitoring and evaluation. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from designated informants, including the Head of Department and relevant officers, utilising semi-structured interview techniques and document analysis. The findings indicate that the Social Service Department plans the programme based on valid health data, despite existing resource limitations. Cross-sector collaboration has assisted in overcoming challenges, with a focus on the distribution of nutritious food packages and support from the Regional Development Planning Agency (Bappeda) as well as the Health Service Department. The monitoring and evaluation conducted have provided feedback, albeit still limited in scope. Overall, this strategy has made a positive contribution to stunting intervention in Jayapura Regency, although strengthening of monitoring mechanisms and improvement of human resource quality are required for more optimal and sustainable outcomes.

Keywords: Strategy; Stunting Prevention; Social Assistance.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan isu yang signifikan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang disebabkan oleh dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas individu. Anak-anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan dan

perkembangan, serta memiliki keterbatasan dalam kemampuan belajar dan berkontribusi secara produktif di masa depan. Di Kabupaten Jayapura, prevalensi stunting masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program intervensi gizi (Rahman, Rahmah, dan Saribulan, 2023).

Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Jayapura pada tahun 2024 mencapai 13,3 persen, dengan total 1.006 balita dari 19 distrik terindikasi mengalami kondisi ini berdasarkan hasil pengukuran status gizi (Efendi, 2024). Angka ini mencerminkan bahwa masalah stunting tetap menjadi isu serius, meskipun berbagai program intervensi telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah (IKP, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan penanganan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai sektor di luar kesehatan. Dengan tingginya jumlah kasus dan penyebarannya yang luas, peran Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan dan memperkuat ketahanan keluarga menjadi semakin penting untuk mencapai target penurunan stunting di Kabupaten Jayapura.

Permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral, termasuk keterlibatan aktif institusi di luar sektor kesehatan. Salah satu institusi yang berperan penting dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Melalui pendekatan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga miskin terhadap risiko stunting, khususnya melalui bantuan yang terencana dan tepat sasaran.

Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar bagi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting. Program ini mencakup distribusi makanan tambahan bergizi, bantuan bahan pokok, serta edukasi mengenai pengasuhan dan pola makan sehat (Rahmah et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, program ini memerlukan

strategi yang tepat agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Peran Dinas Sosial sangat krusial untuk memastikan bahwa proses penyerahan bantuan berlangsung sesuai dengan tujuan program, yang mencakup perencanaan yang matang, identifikasi sasaran penerima manfaat, koordinasi dengan pihak terkait, dan mekanisme pemantauan yang efektif. Oleh karena itu, studi mengenai strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan program ini sangat penting untuk memahami sejauh mana lembaga sosial dapat berperan nyata dalam mengatasi masalah stunting.

Namun, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Beberapa kendala yang sering muncul termasuk terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya sinergi antarinstansi pelaksana, serta rendahnya kesadaran masyarakat penerima manfaat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Selain itu, masih terdapat kurangnya dokumentasi ilmiah yang memadai mengenai bagaimana strategi Dinas Sosial dirancang dan dilaksanakan dalam konteks penanganan stunting. Banyak kajian yang lebih fokus pada intervensi kesehatan, sehingga aspek sosial sering kali kurang mendapatkan perhatian. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial, terutama dalam hal pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sebagai upaya pencegahan stunting dari sudut pandang sosial dan kesejahteraan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti penanganan stunting, tetapi sebagian besar tetap berfokus pada bidang kesehatan, seperti peran Puskesmas, Posyandu, dan Dinas Kesehatan. Sebagai contoh, penelitian oleh Febi Putri Indrasari (2023) mengkaji efektivitas edukasi gizi dalam meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting pada ibu

yang memiliki balita berisiko stunting, sementara Amrul Hasan (2022) menyoroti faktor risiko stunting terkait air minum, sanitasi, dan higiene di daerah pedesaan (Hasan, Kadarusman, dan Sutopo, 2022). Penelitian lain lebih menekankan pentingnya pemberdayaan ibu dalam memenuhi gizi keluarga (Mulyanti dan Astuti, 2025). Namun, kajian yang secara khusus membahas peran dan strategi Dinas Sosial dalam program bantuan penanganan stunting masih sangat terbatas. Padahal, intervensi sosial seperti bantuan pangan, bantuan ekonomi, dan program berbasis keluarga miskin juga memiliki kontribusi penting dalam menurunkan prevalensi stunting, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Jayapura.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan secara khusus membahas strategi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program penyerahan bantuan sebagai bagian dari penanganan stunting. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan medis atau intervensi kesehatan, sementara studi ini fokus pada pendekatan sosial yang belum banyak diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengeksplorasi bagaimana Dinas Sosial merumuskan strategi, mengelola pelaksanaan program, dan mengatasi tantangan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat. Pendekatan kelembagaan dan sosial dalam menangani stunting menjadi nilai tambah dari penelitian ini. Dengan menggali praktik dan pengalaman dari aktor pelaksana di tingkat daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan program penanganan stunting yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis strategi Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura. Dengan memahami strategi pelaksanaan

program secara lebih komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki desain dan implementasi program penanganan stunting yang berbasis sosial.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di lapangan tanpa hanya bergantung pada data numerik (Sutrisno, 2025). Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana Dinas Sosial merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program tersebut, dengan penekanan pada pemahaman subjektif dari informan yang terlibat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menciptakan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran dan strategi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan sumber daya, distribusi bantuan, partisipasi masyarakat, serta evaluasi program.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Bantuan Sosial, dan petugas terkait. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi untuk memastikan kevalidan data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi

data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi Dinas Sosial dalam penanganan stunting (Anwar Thalib, 2022). Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik dalam konteks penanganan masalah stunting di Kabupaten Jayapura.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam menilai efektivitas strategi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, diperlukan seperangkat indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana strategi tersebut disusun dan dilaksanakan secara sistematis serta berorientasi pada hasil. Robbins dan Coulter (2010) mengemukakan bahwa strategi dalam organisasi publik dapat dianalisis melalui lima indikator utama. Indikator-indikator tersebut sangat relevan untuk mengkaji pelaksanaan strategi Dinas Sosial dalam konteks penanganan *stunting* maupun program kesejahteraan sosial lainnya.

Pertama, Perencanaan Program, yaitu sejauh mana program yang disusun didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan dan memiliki tujuan yang jelas. Kedua, Kesesuaian Sumber Daya, yakni kemampuan Dinas Sosial dalam mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, dan logistik secara optimal untuk mendukung pelaksanaan strategi. Ketiga, Pelaksanaan Taktis, yang mencerminkan tindakan operasional konkret yang dilakukan oleh petugas di lapangan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Keempat, Koordinasi Lintas Sektor, yaitu kemampuan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kecamatan, kelurahan, puskesmas, serta lembaga sosial lainnya. Dan kelima, Monitoring dan Evaluasi, yakni proses pengawasan dan penilaian berkelanjutan terhadap pelaksanaan strategi guna memastikan efektivitas dan

efisiensi program. Kelima indikator ini menjadi pokok pembahasan.

Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah vital dalam pelaksanaan program, karena menentukan arah dan sasaran kegiatan dengan jelas. Tanpa perencanaan yang efektif, pelaksanaan program sering mengalami berbagai hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Dalam penanganan stunting, perencanaan memiliki peran strategis guna memastikan bantuan disalurkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Proses ini perlu melibatkan berbagai pihak agar keputusan yang diambil mencerminkan kondisi lapangan, bukan hanya data administratif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat kampung menjadi kunci dalam merancang program yang komprehensif dan berfokus pada hasil yang efektif.

Menurut teori perencanaan strategis, tahap ini harus didasarkan pada data dan analisis kebutuhan serta keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan keputusan relevan dengan kondisi aktual. Perencanaan yang baik mencakup identifikasi masalah, penetapan sasaran, dan strategi yang realistis berdasarkan sumber daya yang ada. Dalam konteks penanganan stunting, penting untuk melibatkan lintas sektor dan memanfaatkan data kesehatan dalam proses perencanaan (Susanti, Widodo, dan Nugraheni, 2019).

Hasil temuan penelitian, terungkap bahwa perencanaan penyerahan bantuan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan dan aparat kampung, dengan data penerima berasal dari hasil pengukuran gizi anak oleh tenaga kesehatan. Akurasi data sangat penting agar penerima manfaat tepat sasaran. Proses ini juga mempertimbangkan anggaran dan dukungan logistik untuk keberlanjutan

kegiatan. Keterlibatan lintas sektor dianggap krusial untuk menjamin efektivitas program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan di Kabupaten Jayapura berjalan sistematis dan berbasis data. Dinas Sosial berkolaborasi dalam pengumpulan dan verifikasi data untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Pelibatan petugas lapangan sejak awal penting untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lokal, seperti cuaca dan akses jalan. Dengan demikian, perencanaan ini mencerminkan koordinasi yang baik dan kesiapan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, proses penyaluran bantuan telah dirancang secara sistematis melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan berbagai entitas, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, aparat setempat, serta tenaga kesehatan. Data mengenai penerima manfaat diperoleh melalui pengukuran status gizi anak yang telah melewati proses verifikasi guna memastikan akurasi dalam penentuan sasaran. Selain itu, perencanaan tersebut juga mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti anggaran, dukungan logistik, kondisi geografis, cuaca, dan aksesibilitas jalan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas program.

Temuan ini konsisten dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh George R. Terry (2019), yang menekankan bahwa perencanaan mencakup penetapan tujuan, tindakan, dan sumber daya yang diperlukan. Penetapan sasaran yang berlandaskan data gizi menggambarkan pendekatan perencanaan yang rasional, yang dapat berpotensi mengurangi kesalahan dalam distribusi bantuan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini relevan dengan teori manajemen publik yang diungkapkan oleh Henry Mintzberg, yang menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi. Keterlibatan berbagai sektor

dalam perencanaan berkontribusi untuk menciptakan koordinasi horizontal yang memperkuat sinergi, memfasilitasi pertukaran informasi, dan menyelaraskan kebijakan demi efektivitas program.

Penelitian ini juga mendukung konsep tata kelola kolaboratif yang diajukan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program publik. Pertemuan koordinasi dan keterlibatan aparat setempat berkontribusi pada peningkatan kualitas data yang diperoleh serta memperkuat komitmen dalam penanganan masalah stunting.

Perhatian terhadap aspek anggaran, logistik, cuaca, dan aksesibilitas jalan mencerminkan penerapan teori kontinjensi, yang menunjukkan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi lingkungan yang ada. Perencanaan yang mempertimbangkan faktor eksternal mencerminkan adanya antisipasi terhadap kendala operasional dalam proses distribusi bantuan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan penyaluran bantuan di Kabupaten Jayapura telah menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, berlandaskan data, melibatkan koordinasi lintas sektor, serta menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Hal ini berkontribusi pada efektivitas program dan memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran serta berkelanjutan dalam usaha mengurangi angka stunting.

Kesesuaian Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan program, seperti terlihat dalam penanganan stunting. Keterbatasan pada anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja dapat mengakibatkan hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting

untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya sejak awal agar program dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dalam konteks ini, sumber daya meliputi anggaran, logistik, dan tenaga pelaksana di lapangan, di mana kesesuaian antara jumlah petugas dan keterampilan teknis menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi bantuan yang efektif. Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, yang memiliki 32 pegawai, mengalokasikan anggaran sebesar Rp268.700.000,00 pada tahun 2024 untuk menyediakan 200 paket bantuan makanan guna mendukung program penanganan stunting.

Namun, implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk menyediakan sumber daya yang cukup. Ketidaksesuaian dalam hal ini bisa menghambat efektivitas program, sehingga strategi adaptif melalui kerja sama lintas sektor menjadi penting. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun jumlah tenaga pelaksana terbatas, kerja sama dengan puskesmas dan aparat kampung dapat mengatasi masalah tersebut. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah juga diakui sebagai faktor penunjang yang penting. Keterlibatan aparat kampung dan relawan dalam kegiatan lapangan membantu menciptakan koordinasi yang baik dan efisiensi dalam pendistribusian bantuan.

Kesimpulannya, meskipun terdapat keterbatasan dalam tenaga pelaksana, kolaborasi yang kuat antara Dinas Sosial, tenaga kesehatan, dan aparat kampung mampu mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan penanganan stunting. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program di Kabupaten Jayapura (Susanti, Widodo, dan Nugraheni, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga pelaksana tidak berfungsi sebagai penghalang utama dalam

pelaksanaan program bantuan penanganan stunting, mengingat kendala tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi yang efektif antara Dinas Sosial, puskesmas, aparat kampung, dan relawan. Selain itu, dukungan anggaran yang berasal dari pemerintah daerah menjadi komponen vital yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Edward III berargumen bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan, namun dampak negatif ini dapat diminimalkan melalui koordinasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, kerjasama lintas sektor yang terjalin mampu untuk mengompensasi keterbatasan tenaga pelaksana, sehingga pelaksanaan program dapat tetap berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas implementasi program bantuan penanganan stunting.

Pelaksanaan Taktis

Pelaksanaan merupakan fase krusial setelah perencanaan, di mana rencana diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Tanpa pelaksanaan yang efektif, program yang telah disusun berisiko tidak mencapai tujuannya. Dalam konteks penanganan stunting, pelaksanaan taktis berkaitan erat dengan distribusi bantuan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan kegiatan di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan ditentukan oleh kesiapan logistik dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Proses distribusi bantuan memerlukan partisipasi petugas dinas, aparat kampung,

dan tenaga kesehatan untuk kelancaran kegiatan. Identifikasi kendala teknis di lapangan juga penting untuk menemukan solusi agar program tetap berjalan sesuai sasaran. Pelaksanaan taktis adalah tahap operasional dari implementasi program, di mana kebijakan yang direncanakan diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata. Dalam teori implementasi, pelaksanaan yang efektif harus mengikuti prosedur yang tepat, mematuhi rencana, dan dapat beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Dalam penanganan stunting, keberhasilan sangat bergantung pada kesiapan petugas, kondisi geografis, dan respons masyarakat penerima bantuan (Reinhart, Pomeo, dan Winarti, 2024).

Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, pada tahun 2024, melaksanakan penanganan stunting dengan menyalurkan 200 paket bantuan makanan ke berbagai distrik, termasuk Distrik Waibhu yang menerima 96 paket. Setiap paket terdiri dari bahan pangan bergizi sesuai kebutuhan gizi anak. Penyaluran dilaksanakan pada 30 September 2024, melibatkan aparat kampung dan tenaga kesehatan, untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan mendukung upaya penurunan stunting di Distrik Waibhu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan secara bertahap dan diatur berdasarkan jadwal. Meskipun ada kendala seperti kondisi geografis yang sulit dan cuaca tidak menentu, koordinasi yang baik antar pihak memungkinkan distribusi tetap berjalan. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya fokus pada distribusi logistik tetapi juga pada edukasi mengenai pola makan bergizi dan kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (Reinhart, Pomeo, dan Winarti, 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan penanganan stunting di Distrik Waibhu dilakukan secara

terjadwal, bertahap, dan melibatkan koordinasi antara Dinas Sosial, tenaga kesehatan, serta aparat kampung. Meskipun menghadapi kendala geografis dan cuaca, program tetap terlaksana dengan baik melalui koordinasi yang efektif. Selain penyaluran bantuan, pelaksanaan program juga mencakup edukasi mengenai gizi dan kebersihan lingkungan sebagai upaya mendukung pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), khususnya pada aspek struktur birokrasi dan komunikasi. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila terdapat pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarpelaksana yang baik, serta komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, koordinasi antara Dinas Sosial, tenaga kesehatan, dan aparat kampung memungkinkan penyaluran bantuan tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan program menunjukkan bahwa komunikasi dan struktur pelaksanaan yang baik berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting.

Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam program penanganan stunting, yang mencakup aspek gizi, sosial, ekonomi, dan peran masyarakat. Kerja sama antarinstansi diperlukan agar program dapat terselenggara secara terpadu. Proses koordinasi dimulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan melibatkan mitra seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, dan aparat kampung untuk memastikan akurasi data penerima dan penyaluran bantuan yang efektif. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, teori *collaborative governance* menunjukkan perlunya keterlibatan berbagai

aktor untuk menangani masalah multidimensi seperti stunting, di mana pembagian peran, pertukaran informasi, dan sinkronisasi kebijakan adalah hal yang esensial (Mamudi, 2025).

Hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan dengan baik melalui rapat teknis sebelum dan sesudah bantuan disalurkan. Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Bappeda dalam laporan dan evaluasi juga diperkuat. BS menekankan pentingnya komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan aparat kampung dalam pembaruan data penerima bantuan. Dengan adanya koordinasi yang rutin, pelaksanaan bantuan dapat lebih terarah, dan kendala di lapangan dapat cepat diatasi.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanganan stunting di Kabupaten Jayapura telah ditangani dengan pendekatan terstruktur dan intensif. Koordinasi dilakukan melalui rapat teknis melibatkan berbagai pihak, dan komunikasi rutin diperlukan untuk memperbarui data dan menyelesaikan masalah di lapangan, selain itu, juga pentingnya pemantauan kondisi gizi anak penerima bantuan, di mana koordinasi dilaksanakan baik sebelum maupun setelah penyaluran.

Koordinasi lintas sektor di Dinas Sosial menunjukkan peranan penting dalam strategi program, meliputi kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kolaboratif dalam kebijakan publik, menunjukkan bahwa efektivitas program bergantung pada komunikasi yang baik dan keterlibatan multi-aktor untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting di Kabupaten Jayapura. Proses koordinasi ini

dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan teknis yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), puskesmas, serta aparat kampung, baik sebelum maupun setelah penyaluran bantuan.

Komunikasi yang dilakukan secara berkala berfungsi untuk memperbarui informasi mengenai penerima bantuan, memantau status gizi anak, serta menangani berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Selain itu, kemitraan dalam penyusunan laporan dan evaluasi program juga memperkuat mekanisme pengawasan, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih terarah dan efisien.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Edward III (1980), yang menekankan bahwa komunikasi merupakan salah satu elemen utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi di antara pelaksana berpotensi mengurangi kesalahan dalam implementasi program serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mendukung konsep *Collaborative Governance* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash (2008). Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat tergantung pada kolaborasi antara pemangku kepentingan yang melibatkan koordinasi, komunikasi, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Dengan demikian, koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai instansi dengan peran yang saling melengkapi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan mendukung pencapaian tujuan penurunan stunting.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen krusial dalam menilai efektivitas program, termasuk dalam pengurangan stunting. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Tanpa sistem pemantauan yang baik, program berisiko tidak mencapai tujuannya karena kurangnya pengawasan. Evaluasi berfungsi sebagai alat refleksi untuk memperbaiki strategi di masa depan, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Dalam konteks penanganan stunting, monitoring mencakup pengawasan distribusi bantuan secara langsung serta laporan dari aparat kampung dan puskesmas. Proses evaluasi melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat, di mana hasil evaluasi dibahas untuk meninjau capaian dan tantangan yang dihadapi. Keterlibatan banyak pihak dalam monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (Jadida, 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. Tim dari Dinas Sosial melakukan pemantauan sampling di lapangan, sedangkan laporan tambahan diperoleh dari puskesmas dan aparat kampung. Hasil evaluasi dibahas dalam forum koordinasi untuk menilai capaian serta kendala pelaksanaan program serta pentingnya pelaporan administrasi dan dokumentasi setiap kegiatan untuk memastikan evaluasi tersebut mencerminkan dampak bantuan terhadap gizi anak penerima. Selain itu, dokumentasi dan laporan hasil distribusi selalu diajukan kepada atasan guna menilai kendala teknis dan efektivitas distribusi.

Monitoring dan evaluasi dalam Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan

partisipatif. Dinas Sosial bersama dengan puskesmas dan aparat kampung melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai harapan. Meskipun sistem ini belum sepenuhnya ideal, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penyerahan bantuan untuk penanganan stunting di Kabupaten Jayapura dilakukan secara berjenjang dan partisipatif. Hal ini melibatkan Dinas Sosial, puskesmas, dan aparat kampung dalam proses tersebut. Proses monitoring dilakukan melalui pemantauan sampling di lapangan, yang didukung dengan data yang diperoleh dari puskesmas dan aparat kampung. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian dibahas dalam forum koordinasi untuk mengevaluasi pencapaian program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Lebih lanjut, dokumentasi dan pelaporan administrasi memainkan peran penting dalam proses evaluasi, karena informasi yang diperoleh memberikan gambaran mengenai ketepatan distribusi bantuan serta dampaknya terhadap kondisi gizi anak yang menjadi penerima. Mekanisme ini menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Teori Sistem yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy (1968), yang menyatakan bahwa suatu organisasi merupakan sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Sosial, puskesmas, dan aparat kampung melaksanakan fungsi-fungsi yang saling melengkapi dalam proses monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan program dapat

berlangsung secara terkoordinasi. Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan *Theory of Change* yang dijelaskan oleh Weiss (1995), yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah serangkaian aktivitas program telah menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang diharapkan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berbasis data, pelaksana program dapat mengidentifikasi kendala yang ada, melakukan penyesuaian strategi, serta meningkatkan efektivitas penanganan stunting di Kabupaten Jayapura.

KESIMPULAN

Implementasi Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, dari aspek perencanaan menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki komitmen yang kuat dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan aparat kampung. Hal ini mencerminkan pendekatan yang partisipatif serta berbasis data, yang memiliki peranan krusial dalam keberhasilan program tersebut. Kedua, Dinas Sosial berhasil mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan kolaborasi antar sektor, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara optimal. Dari pelaksanaan, program dilakukan dalam tahapan yang terencana, disertai dengan pengawasan langsung, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari strategi koordinasi yang efisien antarinstansi, yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif. Terakhir, aspek monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pendekatan berjenjang, yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan Penanganan Stunting, Dinas Sosial perlu melakukan penguatan perencanaan melalui pemutakhiran data penerima bantuan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien. Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan lebih sistematis, melibatkan pihak eksternal untuk menjamin hasil yang objektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk mendalami dampak program terhadap status gizi anak serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program ini.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Efendi, R. (2024). *Prevalensi stunting di Kabupaten Jayapura tahun 2024: Laporan pengukuran status gizi balita*. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
- Hasan, A., Kadarusman, H., & Sutopo, A. (2022). Faktor risiko stunting terkait air minum, sanitasi, dan higiene di daerah pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 45–58.
- IKP. (2024). *Laporan intervensi dan kebijakan publik penanganan stunting di Kabupaten Jayapura*. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
- Indrasari, F. P. (2023). Efektivitas edukasi gizi dalam meningkatkan pengetahuan

pencegahan stunting pada ibu yang memiliki balita berisiko stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 15(1), 23–34.

Jadida, N. (2025). Monitoring dan evaluasi program sosial berbasis komunitas dalam penanganan stunting. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 78–92.

Mamudi, R. (2025). Collaborative governance dalam program penanganan stunting multisektoral. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1), 101–115.

Mulyanti, S., & Astuti, W. (2025). Pemberdayaan ibu dalam pemenuhan gizi keluarga sebagai upaya pencegahan stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 55–67

Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya penanganan stunting di Indonesia: Analisis bibliometrik dan analisis konten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59.

Weiss, C. H. (1995). *Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families*. In J. Connell et al. (Eds.), *New Approaches to Evaluating Community Initiatives*. Aspen Institute.